

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Npmor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat daerah yang di singkat Renja Perangkat daerah.

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui perencanaan yang baik, diharapkan tujuan pembangunan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan.

Rancangan Renja perangkat daerah dibahas pada forum organisasi perangkat daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju dan Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD. RKPD tersebut untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Renja perangkat daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mamuju memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD dan Program dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Mamuju dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas antara lain, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.

Renja DPM-PTSP tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023.

Dalam konteks Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memasarkan potensi daerah yang ada, melakukan promosi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPM-PTSP dituntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah melalui penataan dunia usaha agar mendukung pencapaian indikator makro ekonomi daerah dimana pada setiap digit pertumbuhan ekonomi mampu memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, ketersediaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Subtansi dan muatan Renja Perangkat Daerah meliputi :

1. Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru
2. Lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kel. atau kecamatan
3. Indikator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan
4. Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi,

profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan

5. Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja perangkat daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut ;

1. Persiapan penyusunan Renja OPD,
2. Penyusunan rancangan Renja OPD
3. Pelaksanaan forum OPD
4. Penetapan Renja OPD.

Renja DPM-PTSP Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Renstra OPD DPM-PTSP di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju nomor 71 tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.
4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang informasi, data dan pelaporan

5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

## 1.2 **LANDASAN HUKUM**

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
4. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pintu Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 85);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun Tahun 2019 Nomor 100 );
23. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
24. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 188.45/04/KPTS/I/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolah Keuangan Daerah Kepada Perangkat Daerah



Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Renja DPM-PTSP Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan RKPD 2023 dan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan wajib non pelayanan dasar, yakni urusan bidang penanaman modal.

Tujuan penyusunan Renja DPM-PTSP adalah sebagai Acuan bagi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPM-PTSP untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada Bab dijelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renja DPM-PTSP Tahun 2022.

#### **BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

**BAB. IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DARAH**

Pada Bab ini meliputi tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Mamuju.

**BAB. V PENUTUP**

Bab Penutu terdiri dari Penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Kondisi Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja utama adalah pertumbuhan investasi. Ini sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya: Dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD Tahunan, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja operasi daerah diperuntukkan untuk belanja OPD dan Belanja Publik dengan ruang lingkup kegiatannya (*Sesuai tabel TC. 29 Matriks Evaluasi terlampir*).



2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Doku men	1	1	1	100%	1	3	300%
2	18	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku men	1	1	1	100%	1	3	300%
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Doku men	1	1	1	100%	1	3	300%
2	18	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Doku men	1	1	1	100%	1	3	300%
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Doku men	1	1	1	100%	1	3	300%
2	18	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Doku men	4	4	4	100%	4	12	300%

2	18	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang /Bulsn	1	38	37	97%	38	76	200%	
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4	Doku men	13	4	4	100%	4	21	525%	
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Lapora n	2	14	14	100%	2	18	129%	
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100	Persen	0	100	0	0%	100	100	100%	
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lapora n	0	4	0	0%	4	4	100%	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	

2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38	Dokumen	2	38	37	97%	38	77	203%	
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	0	1	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	Persen	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0%	3	3	0%	
2	18	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0%	0	0	0%	

2	18	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2	08	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	25	24	24	100%	24	73	0%	
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11	1	1	100%	1	13	0%	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	1	1	100%	1	3	0%	
2	18	01	2	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	16	10	10	100%	20	46	0%	
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	4	3	3	100%	3	10	0%	



2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	5	1	1	100%	12	18	0%
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	0	3	3	100%	5	8	0%
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	15	19	14	74%	18	47	0%
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	2	25	25	100%	25	52	0%
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	Unit	1	0	0	0%	0	1	0%

2	18	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	3,1E+11	Milyar /Rupiah	100	3,1E+11	1,4132E+11	46%	3,25E+11	4,66323E+11	150%		
2	18	02	2	01	00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100	%	100%	100	85	85%	100	62	62%		
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	2	2	1	50%	3	6	0%		
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	Keg. Usaha	0	0	0	0%	0	0	0%		
2	18	02	2	02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	0	100	0	0%	100	100	100%		
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1	0	0%	1	1	0%		
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	0	0%	0%	0%	1	1	0%	

2	18	03	0	00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>35</b>	<b>investor</b>	100	<b>35</b>	55	157%	<b>39</b>	65	185%	
2	18	03	2	01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	<b>33</b>	%	100	<b>33</b>	0	0%	<b>33</b>	44	134%	
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	14	1	0	0%	1	15	1500%	
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	18	04	0	00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	%	100	<b>100</b>	47,34	47%	<b>100</b>	82,45	82%	
2	18	04	2	01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	<b>100</b>	%	100	<b>100</b>	100	100%	<b>100</b>	100	100%	
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80	Pelaku usaha	21	80	91	114%	85	197	246%	

2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	58	Keg. Usaha	1	8	8	100%	360	369	636%
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang	1	16	16	100%	112	129	645%
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	Keg. Usaha	31	2	0	0%	3	34	1700%
2	18	05	0	00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>94%</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	<b>194%</b>
2	18	05	2	01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	65	%	0	65	49	75%	70	119	183%

2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	Keg. Usaha	0	58	122	210%	12	134	1340%		
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Pelaku usaha	2	332	332	100%	1	335	33500%		
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	11	Keg. Usaha	0	120	120	100%	12	132	1200%		
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>100</b>	100	100%	<b>100</b>	100	100%		
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>100</b>	100	100%	<b>100</b>	100	100%		
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Doku men	1	12	12	100%	12	25	208%		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional yang dikenal dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Meskipun sistem musrenbang sudah dikembangkan lebih baik, dalam pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal (*tabel TC. 30 Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir*)

Tabel 2 (T-C.30.)

## Matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, IKK/NSPK/SPM/Standar Nasional (Bagi OPD yang ada)	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	
			thn (n-2)	thn (n-1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n+1)	thn (n+2)	thn (n-2)	thn (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(14)	(15)
<b>Indikator Kunci</b>											
1	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA		15%	15%	15%	15%	15%	15%	45,72%		
2	Persentase Nilai Investasi		310 Milyar	325 Milyar	340 Milyar	355 Milyar	360 Milyar	375 Milyar	Rp 141.323.398.520	Rp 155.455.738.372	
3	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		35 Investor	39 Investor	44 Investor	51 Investor	59 Investor	65 Investor	55 Investor	60 Investor	
<b>Indikator Perangkat Daerah</b>											
1	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%	100%	
2	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal		50%	50%	50%	50%	50%	50%	45%	50%	

3	Persentase laporan data base perizinan dan non perizinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	
6	Persentase Peta Potensi investasi tersedia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
7	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti		33%	33%	33%	33%	40%	40%	0%	33%	
8	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selaku pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi dengan pelaku usaha/investasi;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, baik antar daerah antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menghadapi beberapa kendala diantaranya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan kenyamanan bagi penerima layanan
3. Peningkatan Profesionalisme layanan guna mendorong tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju
4. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan pengendalian penanaman modal
5. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi ( Isu strategis RPJMD)
6. Penataan regulasi daerah dalam rangka memberi kepastian hukum dalam bidang pelayanan publik dan penanaman modal
7. Peningkatan Koordinasi antar OPD Teknis dengan DPM-PTSP dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD (*Sesuai Matriks Review Ranwal RKPD TC. 31 Terlampir*)

**TABEL 3 (T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022**  
**KABUPATEN MAMUJU**

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2		3	5		6	2		9	10	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.575.854.845</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100</b>	<b>3.472.464.335</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	Dokumen	18.691.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	18.385.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.991.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2.685.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	3.150.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	3.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	2.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1	2.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	2.300.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	2.500.000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	3.031.497.978	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.974.011.007	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang	2.992.247.978	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		37	2.919.051.007	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	26.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	40.960.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	14.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan Administrasi kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100	Persen	3.150.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	6.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.150.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	6.000.000	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen	13.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1.833.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya		37	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37	Dokumen	13.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		37	1.833.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1	0	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	11.664.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	0	Pengadaan Mebel		8	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2	11.664.000	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100	Persen	113.471.739	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	159.126.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	22.971.739	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	14.581.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	0

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	5.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	139.045.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	316.043.328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	260.843.328	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	190.043.328	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	190.043.328	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	28.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	102.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16	42.000.000	



8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	Persen	30.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	40.602.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	33.602.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	7.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Nilai Investasi</b>	<b>340</b>	<b>Milyar/Rupiah</b>	<b>150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>340</b>	<b>75.000.000</b>	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100	%	20.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	35.000.000	

	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	20.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		3	35.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	Keg. Usaha	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	0	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	130.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		100	40.000.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	130.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1	40.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1	0	

III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>44</b>	<b>investor</b>	<b>20.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>44</b>	<b>10.000.000</b>	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33	%	20.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		33	10.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1	10.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	0	
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	%	80.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100	85.000.000	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90	Pelaku usaha	20.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		90	20.000.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	Keg. Usaha	20.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		100	35.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24	Orang	20.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		24	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3	Keg. Usaha	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		3	15.000.000	

V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	50	%	246.880.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		50	426.274.000	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM	100	%	246.880.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	426.274.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12	Keg. Usaha	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260	Pelaku usaha	176.880.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		260	276.880.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12	Keg. Usaha	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	134.394.000	
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>	100	%	10.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		100	15.000.000	

1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100	%	10.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	15.000.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	10.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		12	15.000.000	
<b>Total Anggaran</b>						<b>4.082.734.845</b>				<b>4.083.738.335</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2023 Merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun ini disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra, dan RKPD Kabupaten Mamuju, namun tetap memperhatikan usulan program dari berbagai pihak baik dari usulan masyarakat (Musrenbang) maupun dari pemangku kepentingan, LSM bila ada. Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPM-PTSP Kabupaten Mamuju dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan melayani dan memahami kebutuhan masyarakat. Disisi lain DPM-PTSP selalu siap dan sanggup untuk membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat melalui kegiatan musrembang yang telah dilaksanakan di kecamatan yang ada di kabupaten Mamuju secara spesifik tidak ada yang terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal maupun terkait pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Namun demikian aspirasi dan harapan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan publik diperoleh dari berbagai media, diantaranya adalah melalui layanan pengaduan yang tersedia diantaranya loket pengaduan secara langsung, website, media sosial (facebook), sms gateway dan media lainnya.

Telaahan terhadap masukan dan saran dari lembaga formal seperti ombudsman maupun LSM serta instrumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat juga tetap dilakukan guna mengefektifkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tepat guna dan tepat sasaran. (*Daftar usulan Musrembang dan Hasil Reses Tabel TC. 32*)

**Tabel 4 (T-C.32.)  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
KABUPATEN MAMUJU**

**OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
<b>I</b>	<b>Program.....</b>				
1	Kegiatan.....				
2	Kegiatan.....	TIDAK ADA			
3	Kegiatan.....				
<b>II</b>	<b>Program.....</b>				
1	Kegiatan.....				
2	Kegiatan.....				
3	Kegiatan.....				
<b>Dst</b>	.....				

\* HASIL RESES DPRD

\* MUSRENBANG



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan WakilPresiden Terpilih periode 2020-2024 yang merupakan tema pembangunan Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata

Dengan memperhatikan hal tersebut BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

DPM-PTSP Kabupaten Mamuju terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan setiap tahunnya dengan program inovasi Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya adalah penerbitan izin untuk pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) ditempat melalui sistem perizinan online.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal melalui Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM dan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing melalui peningkatan kemudahan berusaha dan peningkatan kemitraan Antara pelaku usaha dan UMKM;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal melalui Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS;
4. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
  - a. Penyempurnaan sistem OSS
  - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
  - c. Standardisasi Pelayanan Perizinan Berusaha (SPPB)
  - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
  - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
  - f. Layanan berbantuan OSS
  - g. Layanan pengaduan
  - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS
5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui Optimalisasi pemanfaatan OSS untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
6. Meningkatkan tata kelolah pemerintahan yang baik melalui :
  - 1) Peningkatan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
    - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
    - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensijabatan;

- c. Pengembangan kompetensi ASN;
- d. Pelaksanaan *assessment test*;
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
  - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
  - b. Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;

- 2) Arah kebijakan kedua peningkatan penanaman modal yang berkualitas untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
  - 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi
  - 2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya
  - 3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
  - 1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi;
  - 2. Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
  - 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang

- usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha
  3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global
  2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya

Sebagai institusi penanaman modal di daerah, DPM-PTSP turut mendukung prioritas pembangunan nasional bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengkoordinasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan OPD teknis agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

### 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulbar dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapaitujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program dalam RPJMD ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 yaitu Sulawesi barat mamuju dan malaqbiq yang dijabarkan kedalam misi Gubernur dan wakil gubernur, meliputi : Membangun sumber daya manusia berkualitas berkepribadian dan berbudaya, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi serta mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Program kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat serta pencapaian target dan sasaran Agenda Prioritas Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022. Usulan program kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas SKPD, maupun lintas Kabupaten. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Provinsi

---

ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DPM-PTSP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengacu pada Renstra 2021-2026 tujuan yang ingin di capai adalah meningkatkan investasi daerah sedangkan sasaran yang di tetapkan yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal serta terselenggaranya birokrasi DPMPTSP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra 2021-2026 dapun strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal
2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang prima ( memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan penanaman modal sesuai dengan standar pelayanan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dan Terselenggaranya Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima antara lain :

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Penyederhanaan standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan terpadu
4. Penerapan SOP pelayanan perizinan sebagai standar untuk pelayanan yang cepat, efektif dan efisien

### 3.4 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pada Renstra, program yang akan dilaksanakan DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kewbijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

## **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

## **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

## **6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaPenyusunan RKA,DPA dan Renja SKPD

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**7. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

**TABEL T.C - 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU**

**OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kenutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1						2	3	4	5	6	8	9	10
						<b>Urusan Penunjang Pemerintahan Umum</b>							
<b>2 18</b>						<b>Penanaman Modal</b>							
2	18	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>3.472.464.335</b>		<b>100</b>	<b>6.600.503.815</b>
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	18.385.000		100 Persen	20.223.500
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.685.000		2 dokumen	2.953.500
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3.150.000		1 Dokumen	3.465.000

2	18	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.150.000	1	Dokumen	3.465.000
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.300.000	1	Dokumen	2.530.000
2	18	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.300.000	1	Dokumen	2.530.000
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	2.300.000	1	Dokumen	2.530.000
2	18	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	2.500.000	4	Dokumen	2.750.000
2	18	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.974.011.007	100	Persen	3.271.412.108

2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang	2.919.051.007		37 Orang	3.210.956.108
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	40.960.000		4 Dokumen	45.056.000
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	14.000.000		2 Laporan	15.400.000
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawaian Pada Perangkat Daerah		100 Persen	6.000.000		100 Persen	6.600.000
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	6.000.000		4 Dokumen	6.600.000

2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100	Persen	1.833.000		100 Persen	2.016.300
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		37	Paket	0		37 Paket	0
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		37	Dokumen	1.833.000		37 Dokumen	2.016.300
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	Orang	0		1 Orang	0
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	12.332.000		100 Persen	13.565.200
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8	Unit	0		10 Unit	0
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	Unit	12.332.000		7 Unit	13.565.200
2	18	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	Unit	0		1 Unit	0

2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	3 Unit	0
2	18	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0
2	18	01	2	08	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 Persen	159.126.000	100 Persen	174.303.800
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.581.000	10 Paket	16.039.100
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.832.000	2 Paket	5.135.200

2	18	01	2	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	139.045.000		25 Laporan	152.949.500
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	260.843.328		100%	286.927.661
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	190.043.328		3 Laporan	209.047.661
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	28.800.000		1 Laporan	31.680.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 Laporan	42.000.000		16 Laporan	46.200.000
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100 Persen	40.602.000		3 Jenis	44.662.200



2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	33.602.000	14 Unit	36.962.200	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	10 Unit	7.700.000	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1 Unit	0	
<b>2</b>	<b>18</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>611.274.000</b>		<b>739.401.400</b>	
2	18	02	0	00	00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen penanaman modal</b>	<b>100 Persen</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>138.500.000</b>	
2	18	02	2	01	00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah	100 %	30.000.000	0	100%	33.000.000

2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	Keg. Usaha	0	3 Kegiatan Usaha	15.000.000
2	18	02	2	02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	35.000.000	100%	138.500.000
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.5000.000
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000
2	18	03	0	00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>44</b>	<b>investor</b>	<b>15.000.000</b>	<b>51 Investor</b>	<b>16.500.000</b>

2	18	03	2	01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti		33 %	15.000.000		33%	16.500.000
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	16.500.000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0		1 Dokumen	0
2	18	04	0	00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>		<b>100 %</b>	<b>70.000.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>77.000.000</b>
2	18	04	2	01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online		100 %	70.000.000		100%	77.000.000

2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90	Pelaku usaha	10.000.000	97 Pelaku usaha	11.000.000
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100	Keg. Usaha	35.000.000	105 Keg. Usaha	38.500.000
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24	Orang	15.000.000	26 orang	16.500.000
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3	Keg. Usaha	10.000.000	2 Keg. Usaha	11.000.000
2	18	05	0	00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>441.274.000</b>	<b>50</b>	<b>485.401.400</b>

2	18	05	2	01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM		75 %	441.274.000		100	485.401.400
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		12 Keg. Usaha	30.000.000		15 Keg. Usaha	33.000.000
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		260 Pelaku usaha	276.880.000		260 Pelaku Usaha	304.568.000
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		12 Keg. Usaha	134.394.000		13 Pelaku Usaha	147.833.400
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan		100 %	20.000.000		100%	22.000.000

2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000
										<b>4.083.738.335</b>		<b>6.600.503.815</b>

## BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 yang telah dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituangkan dalam table 4.1 yang dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kenutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6
						<b>Urusan Penunjang Pemerintahan Umum</b>				
<b>2</b>	<b>18</b>					<b>Penanaman Modal</b>				
2	18	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 %	3.472.464.335
2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	18.385.000
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.685.000
2	18	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3.150.000
2	18	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	3.150.000
2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2.300.000

2	18	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Doku men	2.300.000
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Doku men	2.300.000
2	18	1	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Doku men	2.500.000
2	18	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.974.011.007
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang	2.919.051.007
2	18	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Doku men	40.960.000
2	18	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Lapora n	14.000.000
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100	Persen	6.000.000
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lapora n	6.000.000
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen	1.833.000



2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	Paket	0
2	18	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37	Dokumen	1.833.000
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	0
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	12.332.000
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	0
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	12.332.000
2	18	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0
2	18	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0
2	18	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0
2	18	01	2	08	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100	Persen	158.458.000
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	14.581.000
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0

2	18	01	2	08	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	Paket	4.832.000
2	18	01	2	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25	Laporan	139.045.000
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	260.843.328
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	Laporan	190.043.328
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	28.800.000
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16	Laporan	42.000.000
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100	Persen	40.602.000
2	18	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14	Unit	33.602.000
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	Unit	7.000.000
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	0
<b>2</b>	<b>18</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					<b>611.274.000</b>

2	18	02	0	00	00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen penanaman modal</b>		<b>100 Persen</b>	<b>65.000.000</b>
2	18	02	2	01	00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan pemerintah daerah		100 %	30.000.000
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		3 Dokumen	30.000.000
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		0 Keg. Usaha	0
2	18	02	2	02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia		100 %	35.000.000
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	35.000.000
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0
2	18	03	0	00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan Jumlah Investor</b>		<b>44 investor</b>	<b>15.000.000</b>
2	18	03	2	01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti		33 %	15.000.000
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	15.000.000
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0

2	18	04	0	00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal</b>		<b>100 %</b>	<b>70.000.000</b>
2	18	04	2	01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online		100 %	70.000.000
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		90 Pelaku usaha	10.000.000
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		100 Keg. Usaha	35.000.000
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		24 Orang	15.000.000
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		3 Keg. Usaha	10.000.000
2	18	05	0	00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal</b>		<b>50 %</b>	<b>441.274.000</b>
2	18	05	2	01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan LKPM		75 %	441.274.000

2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	Keg. Usaha	30.000.000
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		260	Pelaku usaha	276.880.000
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		12	Keg. Usaha	134.394.000
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20.000.000</b>
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan		100	%	20.000.000
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		12	Doku men	20.000.000
											<b>4.083.738.335</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kaidah Pelaksanaan**

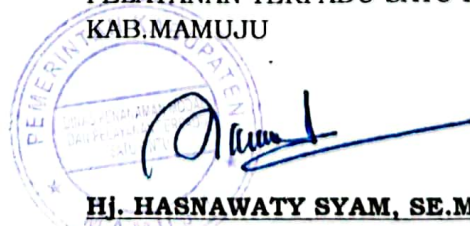
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja DPM-PTSP ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala DPM-PTSP dan di dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Dinas DPM-PTSP bersama unsur pimpinan DPM-PTSP terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renja DPM-PTSP Kabupaten Mamuju selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mamuju. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Merupakan Dokumen rencana kegiatan DPM-PTSP yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Renja ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tahun 2023.

**MAMUJU, 2022**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB.MAMUJU**



**Hj. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si**  
**Pangkat : Pembina TK.I IV/b**  
**NIP : 19680928200604 2 002**